

BAB II

DINAMIKA PEMBANGUNAN BENDUNGAN GERD

Bendungan yang nantinya akan difungsikan menjadi pembangkit listrik ini memang belum lama diinisiasi, namun sumber air yang mengalir pembangkit tersebut telah lama menjadi bahan perdebatan sejumlah negara di sekitarnya. Bab ini akan berisikan eksplanasi terkait ketergantungan serta kepentingan tiap negara tepian, regulasi pemanfaatan sumber daya air di dalamnya, dan pembangunan bendungan yang memicu konflik antar negara tepian Sungai Nil yakni Mesir, Sudan, dan Etiopia, serta upaya penyelesaian konflik Bendungan GERD.

2.1. Sungai Nil: Oase di Tengah Padang Gurun

Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia dengan panjang mencapai 6700 km. Sebagai satu-satunya sungai di dunia yang mengalir melalui Gurun Sahara, Sungai Nil memainkan peran penting sebagai sumber air sejumlah negara. Seperti ditunjukkan pada gambar 2.1 dimana garis-garis biru menunjukkan aliran sungai (Haddad, 2020). Sungai Nil mengalir 11 negara yakni Burundi, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Eritrea, Etiopia, Kenya, Rwanda, Sudan, Tanzania, dan Uganda (El-Nashar & Elyamany, 2018). Lebih dari 280 juta orang bergantung pada Sungai Nil (Haddad, 2020), hal ini ditunjukkan pada Gambar 2.2 di bawah.

Gambar 2.1 Sungai Nil Merupakan Satu-Satunya Sungai yang Mengalir di Gurun

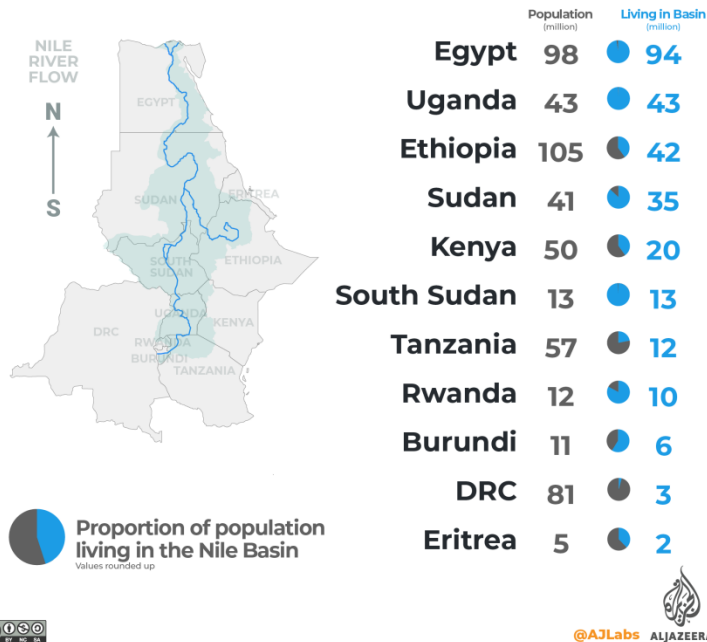


Sumber: Haddad, 2020

Gambar 2.2 Jumlah Populasi di Sekitar Sungai Nil

How many people live along the Nile?

The Nile Basin is shared by 280 million people across 11 countries.



Sumber: Haddad, 2020

Sungai Nil terdiri dari dua anak sungai utama (hulu) yakni *White Nile* dan *Blue Nile*. *White Nile* merupakan anak sungai terpanjang dengan Kagera sebagai anak sungai terjauhnya yang mengalir pegunungan Burundi dan Rwanda, dengan curah hujan rata-rata 1800 mm. Air tersebut mengalir ke Danau Victoria. Sumber lain datang dari Serengeti ke tenggara danau dan rawa di Barat Laut Uganda. Air yang mengalir keluar dari Danau Victoria kemudian

Gambar 2.3 Peta Sungai Nil



Sumber: Haddad, 2020

menuju Danau Kyoga di Utara melewati Kenya dan Uganda. Aliran kemudian bergerak menuju Danau Albert dan menerima aliran masuk dari Sungai Semliki dan Danau Edward yang melewati Republik Demokratik Kongo. Aliran air meninggalkan Danau Albert dan mengalir menuju Juba di Sudan Selatan. Air terus mengalir menuju utara hingga sampai ke Sudan dan bergabung dengan *Blue Nile* (Sutcliffe & Parks, 1999).

Blue Nile mengalir dari dataran tinggi Etiopia, khususnya di Danau Tana yang memasok sekitar 86% air Sungai Nil (El-Nashar & Elyamany, 2018). Danau Tana terletak di ketinggian 1.830 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 3.050 km². Tujuh sungai besar dan 40 sungai kecil berkontribusi terhadap sumber air di Danau Tana. Empat anak sungai utama yakni Gilgel Abbay, Sungai Megech, Sungai Gumara, dan Sungai Rib. Anak sungai tersebut menyumbang lebih dari 95% total air yang berada di Danau Tana (Vijverberg, dkk., 2009). Danau Tana memiliki curah hujan musiman, dimana sebagian besar hujan turun selama empat bulan (Juni hingga September), Curah hujan bervariasi dari 1000 mm di bagian timur laut hingga 1450-2100 mm di bagian barat daya danau (Nile Basin, 2016). Aliran air dari *Blue Nile* bergabung dengan aliran *White Nile* di Sudan dan menjadi Sungai Nil yang mengalir ke wilayah hilir yakni Sudan dan Mesir (Sutcliffe & Parks, 1999).

Gambar 2.4 Danau Tana sebagai Sumber Utama Sungai *Blue Nile*



Sumber: Haddad, 2020

2.2. Kepentingan Negara Tepian akan Sungai Nil

2.2.1 Mesir

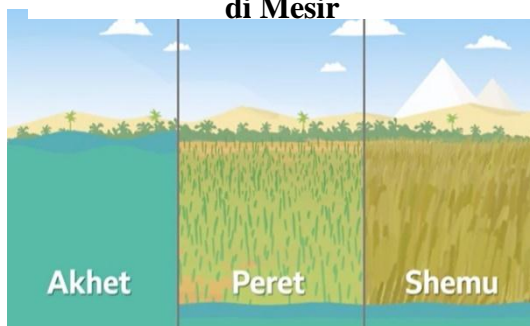
Sejak zaman Mesir kuno, Sungai Nil telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Mesir. Sejarawan Yunani, Herodotus, bahkan menulis bahwa *“Egypt is the gift of Nile”*. Hal ini terbukti bahwa jika bukan karena Sungai Nil, Mesir akan tetap menjadi gurun luas tanpa tumbuh-tumbuhan, serupa dengan Libya di sisi barat dan Arab Saudi di timur. Ketiga negara tersebut terletak pada garis lintang yang sama dan dengan intensitas curah hujan yang rendah. Namun, Sungai Nil telah membuat perbedaan besar bagi Mesir (Hefny & Amer, 2005: 42). Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi Mesir terdahulu, Mohamed Abdel Aty, mengatakan bahwa *“Egypt is a desert, as 95% of the land in the country is desert and depends on the Nile river’s water by 95%”* (El-Said, 2019).

Penamaan Sungai Nil berasal dari kata Nelios yang diambil dari bahasa Yunani yang berarti lembah sungai. Namun, orang Mesir kuni menyebutnya Ar atau Aur yang berarti hitam. Hal ini mengacu pada sedimen kaya dan gelap yang terbawa air Sungai Nil dari *Horn of Africa* ke utara menuju hulu di wilayah Mesir. Aliran air dan nutrisi tersebut mengubah lembah Nil menjadi lahan pertanian produktif dan memungkinkan peradaban Mesir berkembang di tengah gurun pasir (Kiger, 2023).

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, para petani Mesir kuno merupakan salah satu kelompok pertama yang mempraktikkan pertanian dalam skala besar, menanam tanaman pangan seperti gandum dan *barley*, serta tanaman industri seperti rami untuk membuat pakaian (Kiger, 2023). Guna memaksimalkan hasil

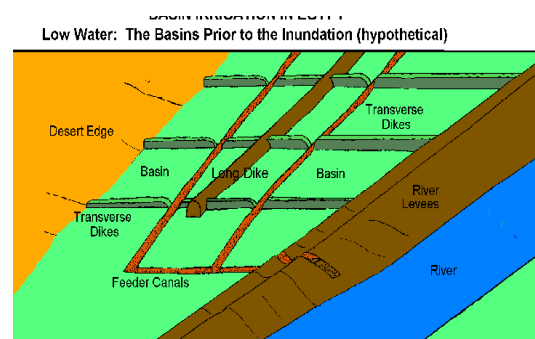
panen, petani kala itu mengembangkan suatu sistem yang disebut *basin irrigation*. Pengembangan irigasi tidak terlepas dari bantuan kalender Mesir kuno yang mengacu pada kondisi Sungai Nil. Penduduk Mesir kuno membagi tahun menjadi tiga musim, yakni Akhet, Peret, dan Shemu. Akhet dimulai pada bulan September – Januari ketika terdapat genangan atau banjir di Sungai Nil. Peret merupakan awal musim dingin, dimulai pada bulan Januari hingga Mei. Shemu menandai situasi musim panas ketika air Sungai Nil surut pada bulan Mei hingga September (Chen, 2021).

Gambar 2.5 Pembagian Musim di Mesir



Sumber: BBC, 2023

Gambar 2.6 Basin Irrigation



Sumber: flowtech, 2021

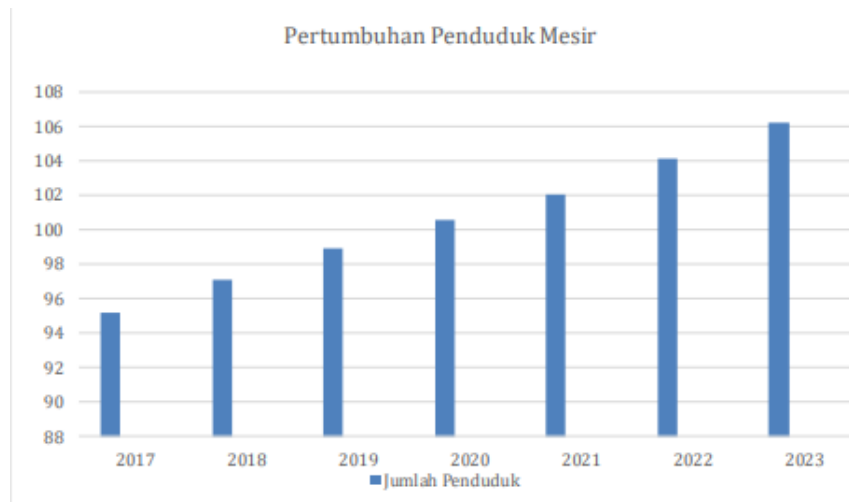
Melalui bantuan kalender tersebut, penduduk Mesir membangun *basin irrigation*. Salah satu konsep irigasi tertua yang pernah ditemukan manusia ini memungkinkan penduduk Mesir memanfaatkan air banjir untuk bercocok tanam. Petani akan membangun jaringan di tepi tanah yang akan membentuk sebuah cekungan dan menggali saluran untuk mengalirkan air banjir ke dalam cekungan tersebut. Air dalam cekungan akan didiamkan selama sebulan sampai tanah siap untuk ditanami (Kiger, 2023). Irigasi ini membantu pengendalian air ketika banjir terjadi di Sungai Nil. Pada puncaknya, banjir akan menggenangi seluruh daratan serta

menaikkan debit air Sungai Nil setinggi 13,72 meter di atas ketinggian normal. Ketika air surut, air akan meninggalkan tanah subur yang sebelumnya tergenang banjir. Tanah subur tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai lahan gandum dan tanaman lainnya tepat saat awal musim dingin dan nantinya akan dipanen pada pertengahan April hingga Mei (Chen, 2021).

Mesir sangat bergantung pada Sungai Nil untuk kebutuhan airnya, namun sumber air tersebut terletak di luar perbatasan Mesir. Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi Mesir terdahulu, Dr. Mahmoud Abu Zeid, pernah menyatakan bahwa “setetes air lebih berharga dari setetes darah”. Ia bahkan mengatakan bahwa *“The Nile River is shared by ten countries, Egypt being the most downstream, and those downstream get what is left after everyone else extracts what they want”*. Kondisi geografis Mesir yang terletak di hulu sebagai tujuan akhir aliran air Sungai Nil membuat Mesir menjadi negara terakhir yang tersisa dalam pemanfaatan air tersebut. Namun letak geografis Mesir yang berada di hulu nyatanya tidak begitu merugikan negara ini. Terbukti bahwa sampai saat ini, Mesir menjadi negara yang paling banyak mengonsumsi air dari Sungai Nil dengan alokasi tahunan mencapai 55,5 miliar meter kubik.

Alokasi air yang didapatkan Mesir merupakan hasil dari perjanjian yang ia sepakati dengan Inggris dan Sudan di tahun 1929 dan 1959 yang disebut sebagai *Nile Agreement*. Perjanjian ini membuat Mesir mendapatkan alokasi air tahunan sebanyak 55,5 miliar meter kubik. Besarnya alokasi ini nyatanya tetap mengancam keamanan air Mesir. Sumber daya air tersebut tetap mengancam jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat (Hefny & Amer, 2005: 44).

Grafik 2.1 Pertumbuhan Penduduk Mesir



Sumber: Statista, 2023

Grafik 2.1 menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah penduduk Mesir terus bertumbuh. Meningkatnya populasi juga akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan penduduk akan air bersih, dalam hal ini terkait sumber daya air dari Sungai Nil.

Guna menjaga keamanan air di negaranya, pada tahun 1971, Mesir meresmikan High Aswan Dam (HAD). HAD terletak di perbatasan utara antara Mesir dan Sudan. HAD memiliki waduk yang berkapasitas 132 km³ dan menyediakan air

untuk 33.600 km² lahan irigasi. Bendungan ini dibangun untuk mengatur aliran sungai yang berada di wilayah Mesir. Banjir Sungai Nil yang terjadi setiap tahun menyebabkan separuh air yang mengalir ke wilayah Mesir terbang sia-sia ke Laut Mediterania. HAD dibangun untuk mengendalikan banjir dengan mengatur aliran sungai dan memasok air untuk irigasi sepanjang tahun. Air dari bendungan digunakan untuk memasok 12 turbin listrik (Water Technology, 2017). Saat ini bendungan tersebut menghasilkan 2.100MW dan digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air yang menyumbang kurang dari 5% dari total produksi energi Mesir (Kiger, 2023).

Gambar 2.7 High Aswan Dam



Sumber: Water Technology, 2017

Bendungan yang ditujukan untuk mengendalikan banjir nyatanya menuai kontroversi, khususnya di sektor lingkungan. Bendungan yang memiliki waduk besar telah mengganggu siklus alami banjir dan berpengaruh pada lumpur organik yang kaya nutrisi ke tepian sungai serta memperkaya lahan subur. Sedimen yang tertahan oleh waduk justru menyebabkan erosi dan mengakibatkan percepatan intrusi air laut dari Mediterania ke delta (Kiger, 2023). Hal tersebut telah menggerus lahan pertanian

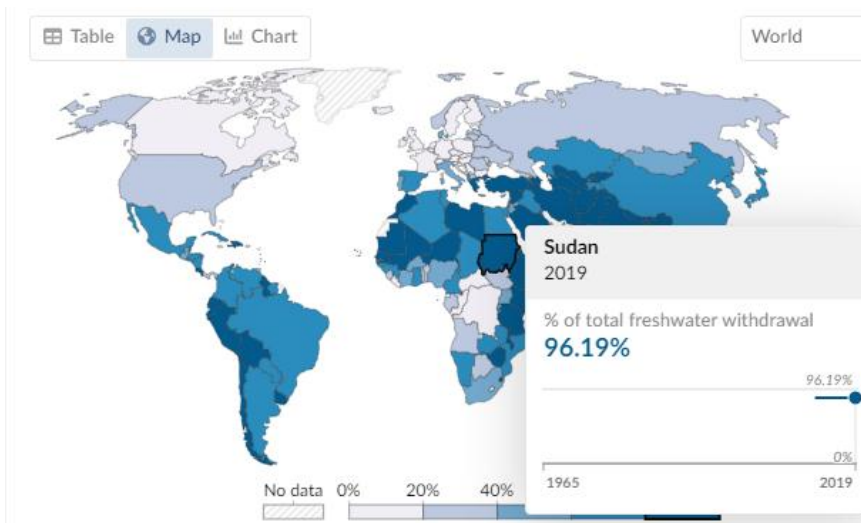
subur di sekitar delta. Delta sendiri merupakan endapan yang terbentuk ketika air sungai bertemu arus air lain. Di Mesir, delta ini berukuran 161 km dan meliputi garis pantai Mesir dari Alexandria di barat hingga Port Said di timur. Delta tersebut merupakan salah satu delta terbesar di dunia dan merupakan rumah bagi lebih dari 40 juta orang. Daerah delta merupakan lahan subur yang terbentuk pada zaman dahulu karena akumulasi lumpur yang terbawa ke hilir Sungai Nil. Lumpur tersebut membawa nutrisi yang berguna bagi lahan pertanian. Ma dari itu, saat ini sekitar separuh hasil pertanian Mesir berasal dari daerah delta. Keberadaan HAD justru mengancam kesuburan dan ekosistem yang berada di wilayah delta (Kiger, 2023). Belum lagi ditambah dengan dibangunnya Bendungan GERD yang dikhawatirkan dapat mengurangi alokasi air Sungai Nil yang mengalir ke wilayah Mesir (El-Nashar & Elyamany, 2018).

2.2.2 Sudan

Sudan terletak di bagian tengah Sungai Nil dimana dua anak sungai utama yakni *White Nile* dan *Blue Nile* bertemu dan membentuk Sungai Nil utama dan kemudian mengalir ke utara menuju Mesir (Khalifa, dkk., 2023). Tidak berbeda dengan Mesir, Sudan juga memiliki ketergantungan akan sumber daya air Sungai Nil. Tercatat tiap tahunnya, 73% air tawar di Sudan berasal dari Sungai Nil dan anak-anak sungainya (Fanack Water, 2022). Sudan juga diuntungkan dari *Nile Agreement* karena berhak mendapatkan alokasi air akan Sungai Nil sebanyak 18,5 miliar meter kubik (Salman, 2012: 26).

Sebagian besar air tersebut digunakan untuk sektor pertanian, tercatat sektor ini memiliki tingkat *water withdrawals* tertinggi di dunia mencapai 96,19% (Gambar2.8). *Water withdrawals* merupakan istilah yang merujuk pada air tawar yang diambil dari sumber air tanah atau permukaan (seperti sungai atau danau), baik secara permanen atau sementara, dan digunakan untuk keperluan pertanian atau industri. Sudan sendiri mendominasi penggunaan air dari Sungai Nil untuk sektor pertanian (Ritchie & Roser, 2017).

Gambar 2.8 Agricultural Water as a Share of Total Water Withdrawals, 2019



Sumber: Ourworlddata, 2019

Sektor pertanian merupakan sumber pendapatan utama di Sudan, tercatat 60-80% penduduk Sudan berprofesi sebagai petani. Sudan dikaruniai lahan pertanian luas yang terletak di antara *White Nile* dan *Blue Nile* (Mahgoub, 2014). Sedimen yang dibawa oleh aliran sungai telah menciptakan lahan subur yang dimanfaatkan oleh penduduk menjadi lahan bercocok tanam (Kiger 2023) Hasil panen utama yang diekspor adalah sorgum, kapas, kacang tanah, wijen, tebu, *arabic gum*, buah-buahan,

dan sayuran (FAO, 2015). Pertanian juga menjadi penggerak sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, industri, dan transportasi. Pemerintah Sudan berharap sektor ini dapat menciptakan banyak peluang kerja, sehingga daerah pedesaan lebih banyak dihuni anak muda dan mengurangi gerakan migrasi ke kota besar. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ketahanan pangan dan mengurangi angka kemiskinan (Mahgoub, 2014).

Sektor pertanian tidak lepas dari pengaruh irigasi. Sudan sendiri menggantungkan hal tersebut pada air dari Sungai Nil dan anak-anak sungainya. Sudan memiliki wilayah irigasi terbesar di Afrika Sub-Sahara dan terbesar kedua di seluruh Afrika. Sub sektor irigasi memainkan peran penting dalam produksi pertanian negara, terutama karena beberapa dekade terakhir terjadi variabilitas dan ketidakpastian akan kekeringan dan curah hujan. Maka dari itu, irigasi menjadi pilihan utama untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan taraf hidup sebagian besar penduduk.

Pentingnya irigasi terbukti pada tahun 2011, ketika hasil panen pada lahan pertanian yang dialiri irigasi (*irrigated agriculture*) mencapai 11% dari total produksi pertanian. Sektor irigasi sangat penting bagi Sudan karena produksinya dapat dikendalikan, berbeda dengan *rainfed agriculrure* yang harus menunggu hujan. Maka dari itu, sistem irigasi sangat diandalkan terutama ketika Sudan memasuki periode kekeringan (FAO, 2015).

Terkait pembangunan Bendungan GERD, Sudan sebetulnya diuntungkan atas keberadaan bendungan tersebut. Pada awal tahun 2020, Menteri Sumber Daya Air Sudan, Yasir Abbas, berbicara tentang bagaimana bendungan tersebut akan memberikan manfaat bagi Sudan. Bendungan GERD akan membuat aliran Sungai Nil lebih mudah diprediksi (BBC, 2021). Hal ini berkaitan dengan fungsi pengendalian banjir di Sungai Nil. Bendungan GERD tidak akan memberikan manfaat bagi Mesir dalam hal pengendalian banjir, karena HAD mampu mengendalikan banjir di Mesir. Bendungan GERD dapat membantu pengendalian banjir di Sudan, terutama di 18 negara bagian dimana sekitar 22%-80% dari total penduduk tinggal di wilayah rawan banjir tersebut. Basheer (2021) melakukan penelitian terkait potensi kerjasama jangka panjang Bendungan GERD dan Sudan guna mencegah banjir di wilayah Sudan. Penelitian ini menunjukkan bahwa operasi kerjasama Bendungan GERD dalam jangka panjang akan mengurangi banjir Sungai Nil di Sudan. Hal ini dapat tercipta jika ada kerjasama dalam bentuk pertukaran data hulu-hilir antara Etiopia dan Sudan. Sehingga menghasilkan koordinasi yang baik guna mengantisipasi banjir di wilayah Sudan (Basheer, 2021).

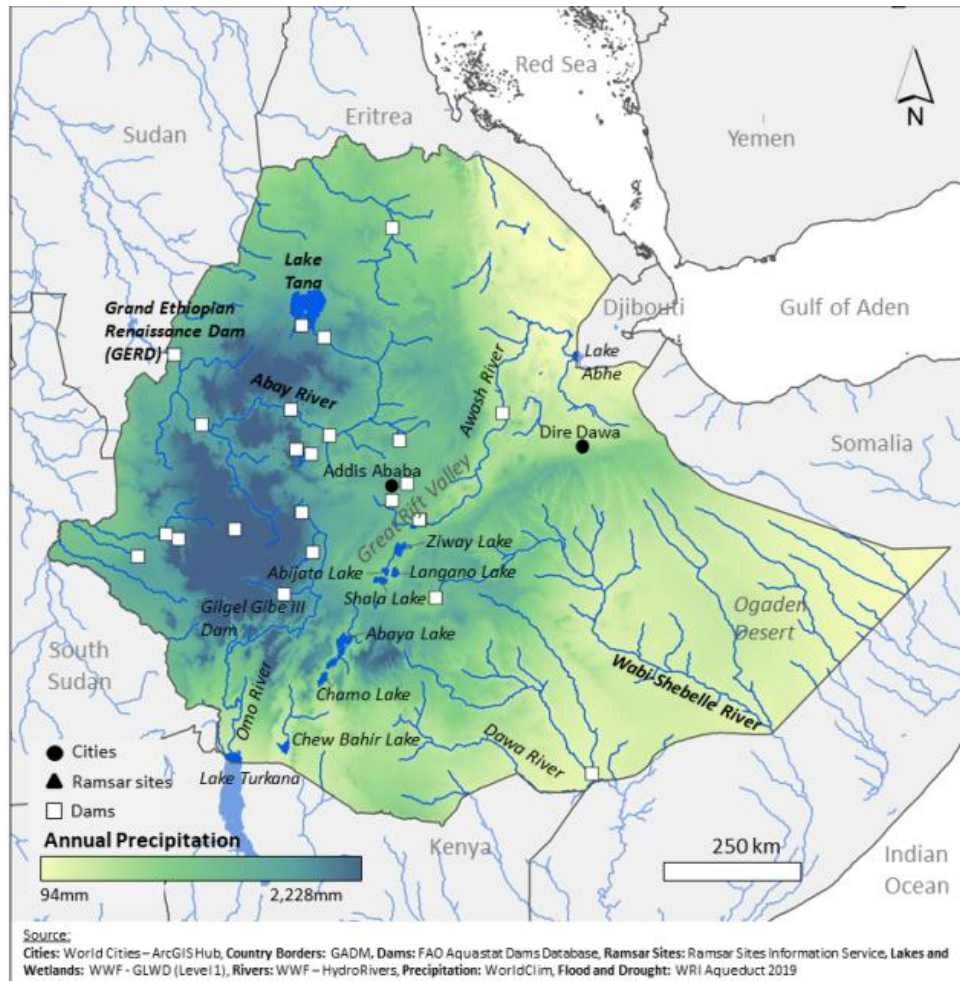
Sudan yang awalnya mendukung Etiopia karena diuntungkan akan pembangunan bendungan kemudian berubah pikiran setelah pembicaraan dengan Uni Afrika di tahun 2021. Yasir Abbas mengatakan bahwa pembangunan bendungan dapat mengancam keamanan nasional jika Etiopia mengisi bendungan tersebut tanpa menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Sudan ingin Etiopia berkomitmen

pada kesepakatan yang mengikat secara hukum, bukan pedoman, mengenai jumlah air yang ditahan dan jadwal pengisian waduk. Mereka juga menginginkan kejelasan terkait mekanisme penyelesaian perselisihan di masa depan. Abbas menegaskan bahwa: “*Without an agreement, the GERD is really a threat to the people downstream.. both the environment and the livelihoods of the people,*”. Sudan akan lebih menderita daripada Mesir jika pengisian bendungan mengurangi jumlah air yang mengalir ke Sudan, karena Mesir memiliki cadangan air yang besar yakni melalui Bendungan HAD (BBC, 2021).

2.2.3 Etiopia

Sebagai negara hulu, Etiopia sebetulnya diuntungkan akan letak geografis tersebut. Sumber air Etiopia sebagian besar bersumber dari bagian *western Abay (Blue Nile)*, Baro-Akobo, Mereb, dan Cekungan Setit-Tekeze/Atbara yang merupakan bagian dari *Nile Basin* yang menghasilkan 70% sumber air permukaan di Etiopia. Sementara daerah Afar-Denakil, Cekungan Awash, Omo-Gibe, dan Rift Valley menyumbang lebih dari 20% sumber air permukaan di Etiopia. Secara kolektif, cekungan tersebut menyediakan 86% pasokan air tahunan untuk Sungai Nil. Etiopia memiliki 22 danau. Danau Tana merupakan danau terbesar di Etiopia dan merupakan sumber air penting bagi Sungai Nil. Etiopia juga memiliki 1,8 juta hektar *wetlands* dan *floodplains* (FAO, 2016).

Gambar 2.9 Sumber Air di Etiopia



Sumber: Winrock, (n.d)

Pertanian sejauh ini merupakan sektor pengambilan air utama di Etiopia. Berdasarkan total area irigasi, *cropping pattern*, dan kalender tahunan, pengambilan air untuk pertanian tahunan diperkirakan mencapai 9 miliar meter kubik untuk keperluan irigasi. Sebagian besar air yang digunakan untuk irigasi adalah air permukaan. Pada tahun 2010, sektor *irrigated agriculture* menyumbang 9% PDB pertanian. Dimana lebih dari 1,2 juta petani mempraktikkan sistem *irrigated agriculture*

pada tahun 2014/2015. Petani di Etiopia bersakala menengah hingga besar menyanar tanaman komersial, khususnya kapas dan tebu (FAO, 2016).

Keuntungan geografis di Etiopia sayangnya kurang dikembangkan sehingga lebih dari 62 juta orang terkena dampak krisis air di Etiopia, bahkan 7,5 persen krisis air di dunia terjadi di Etiopia (Lifewater, 2019). Negara ini telah mengalami serangan kekeringan dan banjir yang berulang setiap tahunnya. Keadaan ini diperburuk oleh fakta bahwa kurang dari setengah populasi memiliki akses ke pasokan air yang memadai. Selama masa kekeringan, penyakit yang berhubungan dengan air merajalela. Wanita dan anak-anak harus berjalan jauh untuk mencari air yang tersisa karena sebagian besar sumber air yang berada di permukaan seperti mata air dan kolam mengering. Sumber air yang tersisa pun sangat tercemar oleh limbah lingkungan, seperti kotoran manusia dan hewan yang terbawa air saat turun hujan (Water.org, 2022).

Selain ancaman kekeringan dan banjir, Etiopia juga dihadapkan pada keterbatasan akses listrik. Sampai saat ini akses listrik di Etiopia merupakan salah satu yang terendah di Afrika. Tercatat hanya 25% penduduk yang dapat menjangkau listrik, sementara cakupan jaringan listrik secara geografis mencapai 60%. Padahal negara ini memiliki sumber daya energi terbarukan yang sangat besar termasuk tenaga air, angin, panas bumi, tenaga surya, dan bio-energi. Menurut MoWIE (2015), potensi *hydro-energy* mencapai 45.000MW, tenaga angin (1035GW), panas bumi (7000MW), tenaga surya (5,2 kWh/m²). Namun negara ini belum memanfaatkan

potensi sumber daya energinya. Kapasitas pembangkit listrik di negara ini sebesar 4228MW dimana lebih dari 90% berasal dari pembangkit listrik bertenaga air (MoWIE, 2015).

Tantangan tersebut juga disusul oleh perubahan iklim yang semakin menjadi setiap tahunnya. The Higher Council of Environment and Natural Resources mulai memimpin sejumlah aksi untuk meningkatkan ketahanan curah hujan dan mengatasi kekurangan air di wilayah yang rentan akan kekeringan. Lembaga tersebut telah mengidentifikasi bahwa empat wilayah yang rentan akan perubahan iklim yaitu Nil, Kordofan Utara, Kordofan Selatan, dan Gedaref (Fanack Water, 2021). Perubahan iklim akan meningkatkan intensitas curah hujan, suhu akan meningkat begitu pula penguapan air sungai. Curah hujan di Etiopia berkisar 2.700 mm/tahun dengan 50-80% terjadi dari bulan Juni hingga September. Perubahan iklim akan meningkatkan suhu rata-rata sebanyak 1,9-3,7°C dan meningkatkan curah hujan antara 29-117 mm/tahun. Peningkatan tersebut akan terjadi di antara bulan September dan Desember (World Bank Group, n.d).

Perubahan iklim telah meningkatkan risiko kekeringan di sebagian wilayah timur dan hampir 90% daerah rawan kekeringan di dataran rendah. Selama 30 tahun terakhir, Etiopia memiliki tujuh wilayah yang mengalami kekeringan parah dan mengakibatkan kelaparan. Tahun 2015 menandakan kekeringan terburuk dalam sejarah Etiopia, dengan curah hujan 65% di bawah rata-rata di wilayah timur laut dan Etiopia bagian tengah. Pada 2016, lebih dari 10 juta orang membutuhkan bantuan

dibangun oleh pemerintah Etiopia sebagai upaya menjawab tantangan kekeringan, risiko banjir, dan keterbatasan akses listrik di Etiopia.

2.3. Regulasi Pemanfaatan Sumber Daya Air Sungai Nil

Ketergantungan tinggi banyak negara akan sumber daya air dari Sungai Nil menimbulkan perdebatan di negara-negara yang berada di tepi Sungai Nil. Berpuluh-puluh tahun sebelum adanya pembangunan bendungan GERD, pada tahun 1929, Mesir dan Inggris membuat kesepakatan mengenai pemanfaatan air Sungai Nil, *The Anglo-Egyptian Treaty*. Perjanjian ini mencakup jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan Sungai Nil dan anak sungainya. Perjanjian tersebut memberi Mesir alokasi air tahunan sebesar 48 miliar meter kubik, sedangkan Sudan memperoleh 4 miliar meter kubik, dari perkiraan hasil tahunan rata-rata Sungai Nil sejumlah 84 miliar meter kubik. *The Anglo-Egyptian Treaty* juga memberikan hak veto kepada Mesir atas proyek konstruksi di Sungai Nil atau anak sungainya, ini dilakukan guna meminimalkan gangguan terhadap aliran air ke Sungai Nil.

Selanjutnya pada tahun 1959, Mesir dan Sudan yang telah merdeka menandatangani perjanjian bilateral yang semakin memperkuat *The Anglo-Egyptian Treaty* 1929. Perjanjian 1959 ini meningkatkan alokasi air ke Mesir dan Sudan. Alokasi air ke Mesir ditingkatkan dari 48 miliar meter kubik menjadi 55,5 miliar meter kubik dan alokasi Sudan ditingkatkan dari 4 miliar meter kubik menjadi 18,5 miliar meter kubik, menyisakan 10 miliar meter kubik untuk memperhitungkan rembesan dan penguapan yang terjadi. Sama seperti perjanjian sebelumnya,

perjanjian 1959 tidak mengizinkan negara yang berada di tepi sungai untuk memanfaatkan air Sungai Nil guna mencukupi kebutuhan mereka terhadap air, termasuk Etiopia yang dataran tingginya menyuplai lebih dari 80 persen air Sungai Nil (Kimenyi & Mbaku, 2015). Kedua perjanjian tersebut secara tidak langsung telah melahirkan aliansi antara dua negara hilir yakni Sudan dan Etiopia (Salman, 2012: 26).

Perkembangan terus ditunjukkan negara lain di tepi Sungai Nil, negara-negara ini telah mengembangkan kapasitas mereka untuk memanfaatkan air Sungai Nil secara lebih efektif guna melaksanakan pembangunan nasional. Sedangkan Mesir di sisi lain bersikeras bahwa hak atas air yang diperolehnya melalui perjanjian 1929 dan 1959 (*Nile Waters Agreements*) harus dihormati, dan proyek pembangunan yang dilakukan di Sungai Nil tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan sebelumnya dari Mesir. Sejumlah pemimpin Mesir bahkan mengancam akan berperang untuk melindungi "*acquired rights*" ini. Hal ini dikarenakan Mesir memperoleh hak tersebut dari pemerintah Inggris yang berkuasa saat itu.

Negara yang berada di tepi sungai bagian hulu seperti Kenya, Tanzania, Uganda, dan Etiopia, berpendapat bahwa mereka tidak terikat oleh perjanjian ini karena mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatannya. Jadi mereka tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut seolah-olah membuat negara lain di luar Mesir dan Sudan hidup berdasarkan belas kasihan mereka. Negara hulu juga harus tunduk pada pengawasan Mesir dalam melaksanakan

pembangunan nasional mereka. Banyak pihak menganggap implementasi *Nile Waters Agreement* tidak sesuai dengan status mereka sebagai negara merdeka yang berdaulat (Kimenyi & Mbaku, 2015). Perjanjian ini dirasa kurang merepresentasikan beragam kepentingan yang ada di sepanjang Sungai Nil. Terkait dengan kepemilikan akan sumber daya air Sungai Nil dapat dilihat dari dua dimensi. Pertama, secara historis dan perjanjian tertulis air yang menjadi sumber kehidupan banyak orang di Afrika tersebut merupakan milik Sudan dan Mesir yang berada di hilir. Namun jika dilihat dari asal air yang mengalir di Sungai Nil, ini berarti air tersebut milik negara yang berada di hulu, yang menyuplai sebagian besar air tersebut.

Pada 22 Februari 1999, negara-negara yang berada di tepi Sungai Nil membentuk *The Nile Basin Initiative* (NBI). NBI merupakan suatu kemitraan antar pemerintah yang terdiri dari 10 negara yang berada di tepi Sungai Nil, yaitu Burundi, Kongo, Mesir, Etiopia, Kenya, Rwanda, Sudan Selatan, Sudan, Tanzania, dan Uganda, dengan Eritrea sebagai pengamat. Lembaga ini menyediakan forum konsultasi dan koordinasi di antara negara-negara tepi Sungai Nil untuk pengembangan dan pengelolaan berkelanjutan perairan Sungai Nil dan sumber daya terkait agar semua pihak sama-sama memperoleh keuntungan, termasuk untuk pembuatan perjanjian multilateral baru (Swain, 2002). NBI secara eksplisit telah menyatukan negara-negara yang berada di tepi Sungai Nil, baik yang berada di hulu sampai negara yang berada di hilir. Diskusi mengenai permasalahan dan pengembangan Sungai Nil menjadi lebih terfokus dalam satu forum ini (Nile Basin

Initiative, 2021). Walaupun NBI bertugas menangani masalah seputar tepi Sungai Nil, namun lembaga ini tidak hadir dalam permasalahan Bendungan GERD.

2.4. Program Pembangunan Bendungan GERD

Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) adalah bendungan pembangkit listrik tenaga air yang dibangun Etiopia di Sungai Abbay/Nil Biru. Etiopia merupakan negara pemasok air terbesar di Sungai Nil. Tercatat tiap tahunnya Etiopia memasok 86% aliran air ke Sungai Nil dengan total aliran tahunan rata-rata mencapai 77 miliar meter kubik (Embassy of Ethiopia, 2021). Potensi *hydropower* inilah yang coba dimanfaatkan Etiopia melalui pembangunan bendungan GERD.

Lokasi bendungan diidentifikasi ketika US Bureau of Reclamation pertama kali melakukan survei di Sungai Nil antara tahun 1956 hingga 1964. Pada tahun 1964, lembaga tersebut mengusulkan pembangunan bendungan di lokasi tersebut. Bendungan tersebut berpotensi menyimpan air sebanyak 11-16 miliar meter kubik (Water Technology, 2017). Proyek ini terletak 700 km di sebelah barat laut ibu kota Etiopia, Addis Ababa, di wilayah Benishangul – Gumaz dekat Sungai Nil Biru. Nantinya ketika pembangunan bendungan selesai, GERD akan menjadi bendungan terbesar di Afrika dengan panjang 1.800m, tinggi 155m, dan total volume mencapai 10,4 juta m³.

Bendungan ini akan menahan waduk (*reservoir*) seluas 1.875 km² (webuild, 2023). Bendungan GERD dirancang dengan waduk yang berkapasitas 74 miliar meter kubik (bcm) dengan ketinggian air

640 meter di atas permukaan laut (mdpl). Dari 74 bcm, sekitar 15 bcm yang berada pada ketinggian kurang dari 595 mdpl merupakan bagian yang disebut '*dead storage*' artinya air yang berada pada bagian ini akan tetap berada di waduk karena mewakili tingkat operasi minimum bendungan untuk menjalankan 13 turbin pembangkit listrik. Selama dua tahun pertama, 15 bcm dari *dead storage* dan

3,4 bcm yang bertindak sebagai

penyangga akan ditahan dalam waduk (tidak akan dilepaskan ke sungai). Sehingga volume air yang tersimpan selama dua tahun pengisian adalah 18,4 bcm. Setelah pengisian selama dua tahun pertama ini, Etiopia berencana melepaskan minimal 31 bcm/tahun (Ethiopia Insight, 2020).

Pembuatan bendungan ini didanai sepenuhnya oleh Etiopia, setelah negara tersebut menandatangani kontrak pembangunan senilai \$4,8 miliar dengan

Gambar 2.12 Letak Geografis Bendungan GERD



Sumber: BBC, 2011

perusahaan Italia, Salini Costruttori (saat ini namanya menjadi webuild) (The Grand Ethiopian Renaissance Dam: A Timeline, 2020).

Gambar 2.13 Grand Ethiopian Renaissance Dam



Sumber: Haddad, 2020

Bendungan ini menjadi lebih berarti bagi masyarakat Etiopia terutama karena pendanaan pembangunan bendungan ini dibiayai sepenuhnya oleh masyarakat dan pemerintah Etiopia. Bank Dunia kala itu menolak untuk membantu membiayai pembangunan, sehingga Etiopia tidak punya pilihan selain memobilisasi dana dari warga negaranya. Setiap warga negara termasuk penyemir sepatu dan petani membeli obligasi pemerintah untuk membantu membiayai proyek tersebut. Penduduk Etiopia melihat Bendungan GERD sebagai sumber kemerdekaan dan kebanggaan negara. Lebih lanjut, mereka melihat bendungan tersebut sebagai upaya berjuang melawan kemiskinan (Abteu & Dessu, 2019).

Pada tahun 2014, Mesir berhasil meyakinkan Uni Eropa, Rusia, China, Italia, dan Bank Dunia untuk menghentikan pendanaan pembangunan bendungan serta pembekuan pinjaman internasional ke Etiopia senilai \$3,7 miliar termasuk pinjaman

China sebesar satu miliar dolar. Hukum internasional melarang organisasi internasional atau negara manapun untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek apapun di Sungai Nil, baik melalui pinjaman, hibah, atau bantuan yang akan merugikan hak negara lain (Berhane, 2014). Pada satu kesempatan, Mesir menguatkan posisinya terkait hal tersebut melalui pernyataan Menteri Luar Negeri, Sameh Shoukry, dalam pertemuan African Affairs Committee bahwa tidak ada negara yang secara langsung membiayai bendungan, semua mitra internasional memahami bahwa proyek tersebut dapat menimbulkan perselisihan, sehingga mereka enggan terlibat dalam perselisihan tersebut (Egypt Independent, 2021).

Etiopia menanggapi hal tersebut dengan menekankan sikap independennya. Imbas pengaruh Mesir yang berhasil menggagalkan bantuan asing terhadap proyek bendungan GERD, Etiopia harus membiayai proyek tersebut seorang diri. Pemerintah Etiopia mengklaim bahwa mereka tidak lagi tertarik dengan bantuan asing. Etiopia juga menolak tawaran Mesir yang ingin mengambil bagian dalam pendanaan dan kepemilikan bendungan. Namun, Chinese Export-Import Bank akan memberikan \$1 miliar dolar untuk pembangunan saluran transmisi listrik sebagai bagian dari pembangkit listrik, tapi hal ini tidak termasuk dalam biaya proyek bendungan sejumlah \$4 miliar dolar tersebut (Berhane, 2014).

Bendungan GERD dimaksudkan oleh Etiopia sebagai solusi atas permasalahan dalam negerinya. Menteri Pertambangan dan Energi Etiopia, Alemayehu Tegen, mengutarakan keterbatasan akses listrik di Etiopia pada

pernyataannya di pertemuan ke-14 Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB tahun 2006. Ia menyatakan bahwa situasi energi di Etiopia ditandai dengan kurangnya akses listrik dan layanan energi modern. Dimana lebih dari 83% populasi di Etiopia tidak memiliki akses listrik dan lebih dari 94% penduduk masih menggunakan kayu bakar sebagai sumber daya utama mereka untuk bahan bakar memasak dan pemanas. Ketersediaan energi, khususnya tenaga listrik, menawarkan peluang pengembangan ekonomi dan memberikan kontribusi untuk mengatasi kemiskinan, melindungi lingkungan, dan mencapai Millenium Development Goals (MDGs) (Tegenu, 2006).

MDGs dideklarasikan oleh PBB pada September 2000. Para pemimpin negara anggota PBB yang menyepakati hal ini akan berusaha memberantas kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, penurunan kualitas lingkungan, dan diskriminasi terhadap perempuan. MDGs memiliki target yang ditetapkan untuk tahun 2015. Pembangunan bendungan GERD merupakan upaya untuk mencapai salah satu target MDGs (WHO, 2018). Bendungan GERD yang dahulu dinamai Bendungan Milenium diharapkan dapat menjadi realisasi target tersebut. Tujuan pembangunan GERD yakni untuk mengeluarkan jutaan penduduk Etiopia dari jurang kemiskinan dan menyediakan akses listrik ke lebih dari 100 juta penduduk (Embassy of Ethiopia, 2021).

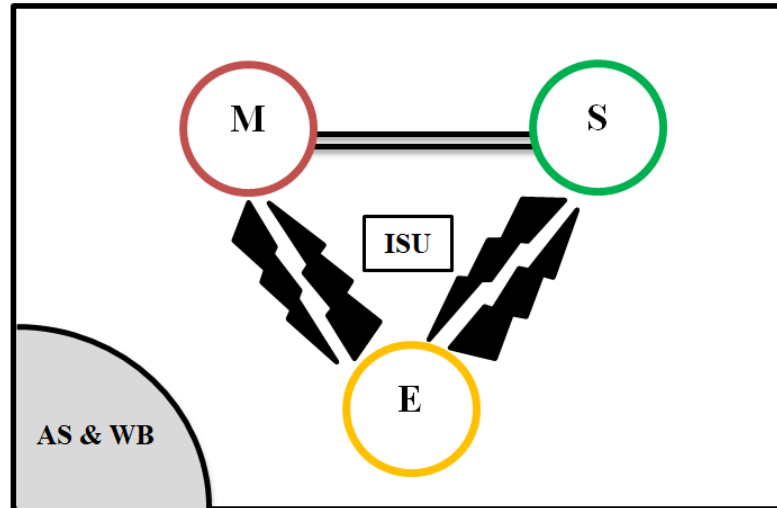
Di dalam negeri, proyek pembangunan bendungan GERD merupakan proyek sosio-ekonomi berkelanjutan yang bertujuan mengganti bahan bakar fosil dan

mengurangi emisi CO2. Hal ini diyakini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Etiopia. (Higdon, dkk, 2022).

Pemerintah Etiopia telah menganggap bendungan ini sebagai simbol kedaulatan dan persatuan. Hal ini merujuk pada perayaan pertempuran Adwa (1896), dimana Etiopia berhasil mengalahkan penjajah kolonialnya, Italia. Di era modern ini, pemerintah dan media menggambarkan Bendungan GERD sebagai “*the new Adwa*”, melambangkan kemerdekaan Etiopia dari pengaruh asing, merebut kembali tempatnya dalam sejarah Afrika, serta memimpin benua Afrika melawan pemerintah kolonial. Kali ini bukan Italia yang Etiopia lawan, melainkan mereka yang telah sejak lama mendapatkan banyak bagian akan Sungai Nil. Mesir dituduh mempertahankan kekuasaan kolonial atas Sungai Nil dengan mempertahankan *nile waters agreement* yang mengalokasikan air sungai kepada Mesir dan Sudan, tanpa mempertimbangkan hak negara hulu (Fantini, 2020). Etiopia sebagai salah satu negara hulu kemudian berusaha memperoleh haknya dengan membangun bendungan Grand Ethiopia Renaissance Dam (GERD).

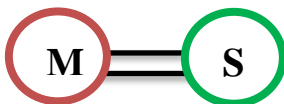
2.5. Konflik Bendungan GERD

Gambar 2.14 *Conflict Mapping Bendungan GERD*



Sumber: Olahan penulis dari berbagai sumber

Keterangan:



Mesir dan Sudan sebagai sesama negara hilir beraliansi menentang pembangunan Bendungan GERD.



Mesir berkonflik dengan Etiopia.



Sudan berkonflik dengan Etiopia.



Mesir dan Sudan sebagai negara hilir khawatir bahwa pembangunan Bendungan GERD akan mengurangi alokasi air yang mengalir ke negaranya.



Amerika Serikat dan Bank Dunia diundang oleh Mesir sebagai pihak ketiga sebagai pengamat negosiasi guna menyelesaikan konflik Bendungan GERD.

Harapan akan persatuan dan pengembangan yang diharapkan Etiopia dari bendungan ini nyatanya berbuntut pada konflik antar negara. Mesir dan Sudan menganggap bahwa pembangunan Bendungan GERD sebagai ancaman terhadap keamanan air di negaranya. Hal ini disebabkan Bendungan GERD akan menampung sekitar 74 bcm yang hampir setara dengan seluruh volume tahunan Sungai Nil yang mengalir ke Bendungan HAD di Mesir. Saat ini, Mesir menderita kekurangan air bahkan tanpa memperhitungkan Bendungan Gerd. Hal ini mengacu pada sumber daya air yang mengalir ke Mesir sebanyak 60 bcm, sedangkan tingkat konsumsi air di Mesir mencapai 80 bcm. Tercatat bahwa Mesir mengimpor setengah produk makanannya dan mendaur ulang 25 bcm air setiap tahunnya. Jika GERD dilaksanakan tanpa kesepakatan, Mesir akan menghadapi risiko kekeringan dan kehilangan lebih dari 1 juta pekerjaan dan sekitar \$1,8 miliar *economic production* setiap tahunnya. Maka dari itu, pembangunan dan pengoperasian Bendungan GERD akan berdampak signifikan terhadap sumber daya air Mesir. Mesir akan kehilangan 10 hingga 15 miliar meter kubik imbas keberadaan Bendungan GERD di Etiopia (Al-Anani, 2020).

Sebagai negara yang berada di hilir, Sudan juga akan dirugikan akan keberadaan Bendungan GERD. Menurut Marc Jeuland, *Associate Professor* di *Environmental Science & Policy Division, Stanford School of Public Policy*, selama tahap konstruksi, Bendungan GERD akan berdampak pada menurunnya kinerja pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sudan. Penduduk yang bergantung

terhadap irigasi untuk pertanian tidak akan mampu menanam dengan baik. Hal ini akan merugikan perekonomian Sudan yang sebagian besar disokong oleh sektor pertanian. Hal ini akan bertambah buruk jika terjadi konflik militer antara Mesir dan Etiopia. Ribuan bahkan jutaan petani akan terpaksa mengosongkan lahan pertanian mereka, sedangkan lahan yang dijalankan oleh pemerintah dan sektor swasta harus terhenti (El-Affendi, 2022).

Kemungkinan eskalasi konflik terjadi pada tahun 2013 ketika Mesir dipimpin Mohamed Morsi. Morsi menegaskan posisi Mesir dalam konflik ini dengan menyatakan bahwa *“all options are open”* untuk menghadapi segala ancaman terhadap pasokan air negaranya yang disebabkan oleh Bendungan GERD (BBC, 2013). Semua opsi yang dinyatakan Morsi termasuk intervensi militer, jika Etiopia terus membangun bendungan di Sungai Nil. Para ahli beranggapan bahwa Mesir sangat serius untuk mempertahankan jatah airnya dan jika Etiopia melanjutkan pembangunan bendungan pembangkit listrik terbesar di Afrika, maka serangan militer bukanlah hal yang mustahil (McGrath, 2014).

Etiopia di sisi lain tidak akan semudah itu menyerahkan haknya akan Bendungan GERD yang dianggap sebagai simbol kedaulatan dan persatuan negara. Bagi rakyat Etiopia, Bendungan GERD digambarkan sebagai *“the new Adwa”* yang melambangkan kemerdekaan Etiopia dari pengaruh asing, merebut kembali tempatnya dalam sejarah Afrika, dan memimpin benua tersebut melawan kekuasaan kolonial. Kalin ini Mesir dianggap mempertahankan pengaruh kolonial atas Sungai

Nil dengan mempertahankan perjanjian antara Mesir dan Sudan pada tahun 1929 dan 1959 (*The Nile Agreement*) yang mengalokasikan air sungai ke kedua negara tanpa mempertimbangkan hak negara-negara hulu (Fantini, 2020). Selain itu, sepanjang berdirinya negara Etiopia selama hampir 150 tahun, negara yang dijuluki *mother land* ini masih belum mengoptimalkan pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Dalam konteks inilah pemerintah Etiopia memandang Bendungan GERD sebagai '*weapon*' dalam perjuangan negara melawan kemiskinan (Floyd, 2022).

Ancaman penggunaan militer sebetulnya telah hadir sejak lama guna mempertahankan hak tiap negara yang bergantung pada sumber daya air Sungai Nil. Pada pertengahan 1970-an, terdapat laporan yang menunjukkan bahwa pasukan Mesir terlibat dalam penghancuran alat konstruksi yang ditujukan untuk membangun bendungan Etiopia. Selain itu, pada tahun-tahun akhir kepemimpinan Presiden Mesir, Mubarak (1981-2011), terungkap bahwa para pejabat pemerintah telah mengindikasikan jika terjadi krisis antara Mesir dan Etiopia, maka mereka menyatakan bahwa: "*there will be no war – we [would] send a plane to bombard the dam and [it would be] back in the same day, that simple*" (Maher, 2021). Kemudian pada tahun 2012, WikiLeaks mendapatkan dokumen dari *strategic intelligence company* AS, Stratfor, yang mengungkapkan rencana Mesir dan Sudan untuk membangun landasan udara untuk '*bombing a dam [without naming it] in the Nile in Ethiopia*' (Carlson, 2013). Tahun berikutnya, pada pertemuan Politisi Mesir yang dipimpin Presiden Morsi saat itu, menyebut bendungan tersebut sebagai '*declaration*

of war' dan mengusulkan tindakan militer untuk menggagalkan proyek tersebut (Dunne, 2020).

Pada tahun 2011-2013, Mesir bahkan memobilisasi publik secara ekstrim dan mengancam akan berperang jika Etiopia tetap melanjutkan pembangunan bendungan (Hashim, 2014). Sejumlah pernyataan maupun rencana untuk mengambil langkah ekstrim terhadap penyelesaian konflik telah ditunjukkan Mesir, Sudan, dan Etiopia. Pernyataan agresif seperti tersebut dapat memicu kemarahan masyarakat dan membatasi pilihan kebijakan para pemimpin ketika berusaha menyelesaikan konflik.

Perdebatan antar 3 negara ini tidak kunjung mencapai kata sepakat walaupun dengan sejumlah strategi penyelesaian konflik yang mengiringinya. Permasalahan utama terletak pada ketidaksepakatan terkait waktu pengisian waduk dan aliran air yang harus dialirkan ke negara-negara hilir. Mesir meminta jangka waktu tujuh tahun yang memungkinkan untuk melepaskan 40 miliar meter kubik air setiap tahun (Farouk, 2019). Sementara Etiopia mengusulkan waktu tiga tahun agar tidak menunda rencana pembangunannya. Apalagi bendungan ini dibuat untuk menjadi pembangkit listrik yang digunakan untuk kepentingan domestik dan ekspor. Dalam jangka panjang, masalah utamanya adalah mengenai bagaimana pengelolaan dan pengoperasian GERD di bawah skenario iklim yang tidak pasti, terutama dipengaruhi perubahan iklim yang semakin menjadi tiap tahunnya. Negara-negara tersebut belum menyetujui data yang akan menjadi pedoman dan definisi konsep dari kekeringan parah yang dapat terjadi di wilayah itu. Kekhawatiran ini meningkat terutama karena

pembangunan GERD. Selain itu, koordinasi dengan bendungan lainnya di hilir, seperti *High Aswan Dam* di Mesir juga diperlukan (Fantini, 2020).

Presiden al-Sisi yang pada tahun 2014 berhasil menggulingkan Morsi telah mengambil langkah yang lebih kooperatif dengan kurang menghiraukan opsi militer. Namun, wilayah yang berkonflik dengan gejolak politik, konflik sipil, dan kelaparan tidak akan mampu menanggung gejolak tambahan seperti eskalasi konflik imbas pembangunan Bendungan GERD (Floyd, 2022). Maka dari itu, jalan keluar yang mengedepankan sikap diplomatis sangatlah dibutuhkan dalam upaya menyelesaikan konflik Bendungan GERD.

2.6. Upaya Penyelesaian Konflik Bendungan GERD

Jalan keluar dari permasalahan ini harus segera diupayakan guna menghindari eskalasi konflik. Ketiga pihak yang berkonflik aktif mengupayakan penyelesaian konflik, terutama melalui negosiasi. Negosiasi diawali pada tahun 2012 melalui *The International Panel of Experts (IPoE)*. Ketiga negara setuju untuk berkumpul dengan diwakilkan oleh dua orang dari tiap negara dan empat orang dari pihak luar (Attia & Saleh, 2021). Setelah diskusi selama satu tahun, IpoE menghasilkan laporan yang berisi diperlukan adanya kajian mendalam terhadap dampak bendungan terhadap negara hilir dan stabilitas struktur bendungan (Helal, 2020).

The Tripartite National Council (TNC) dibentuk pada tahun 2014 dan bertujuan melakukan studi yang direkomendasikan IPoE dengan bantuan konsultan asing (El Tawil. 2020). Dua konsultan asal Perancis, Artelia Group dan BRL

Ingénierie dipilih untuk melakukan penelitian terkait dampak bendungan (Sweet, 2016). Pada pertemuannya yang ke-17, TNC gagal mencapai konsensus terhadap laporan teknis terhadap potensi dampak bendungan GERD terhadap Mesir dan Sudan (Regional Ministers Fail to Reach Agreement on Ethiopian Dam Studies Report, 2017).

Negosiasi dilanjutkan di antara ketiga negara yang berkonflik, dimana pada 23 Maret 2015 mereka menyepakati Declaration of Principles (DoP). Dokumen ini berisi kesepakatan mereka akan prinsip-prinsip dasar yang menanungi proses pembangunan Bendungan GERD (Rizk, El Sharnoubi, & Darwish, 2015). Lebih lanjut, DoP menunjukkan komitmen ketiga negara untuk menyelesaikan konflik secara damai dengan mengedepankan kerja sama (The Grand Ethiopian Renaissance Dam: A Timeline, 2020).

Pada Mei 2018, ketiga negara sepakat membentuk *National Independent Scientific Research Study Group* (NISRG) yang bertujuan melakukan diskusi guna meningkatkan pemahaman dan kerja sama di antara ketiga negara terkait Bendungan GERD. NISRG secara khusus akan membahas penggunaan sumber daya air dan menetapkan tindakan pencegahan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh pembangunan bendungan. Kelompok ini akan terdiri dari 15 anggota yang berisi lima perwakilan dari setiap negara. Mereka akan mengadakan sembilan pertemuan dan hasil negosiasi akan diserahkan kepada Menteri Perairan masing-masing negara (Tawfeek, 2018). Pertemuan terus dilaksanakan dengan salah satu topik penting yaitu

operasional pengisian bendungan. Pada Pertemuan Dewan Keamanan PBB ke-74, Presiden al-Sisi menyampaikan pidatonya terkait masalah ini, Mesir mengusulkan pengisian bendungan dengan jangka waktu tujuh tahun, namun Etiopia menolak proposal Mesir dengan mengklaim bahwa proposal tersebut “tidak pantas” dan melanggar kedaulatan Etiopia (*Sisi Says Nile Water Issue a Matter of Life and Death for Egypt, Wants Sudan Removed from Terror List*, 2019). Lebih lanjut, Mesir menyatakan bahwa pembicaraan antar ketiga negara telah mencapai kebuntuan dan memanggil mediasi internasional untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang (El-Gundy, 2021).

Pada akhir 2019, Mesir yakin bahwa pembicaraan trilateral tentang konflik ini tidak membuahkan hasil. Selama pertemuan terakhir NISRG, perbedaan pendapat di antara ketiga negara semakin meningkat. Waktu terus berjalan, sementara kesepakatan tidak kunjung mencapai hasil. Padahal Etiopia mengumumkan pengisian bendungan selama musim hujan 2020 ketika hujan lebat mengguyur Dataran Tinggi Abyssinian dan menyebabkan banjir tahunan di Sungai Nil (Helal, 2020).

Situasi tersebut memungkinkan ketiga pihak menjalankan prinsip DoP Pasal 10 yang berbunyi:

Ketiga negara berkomitmen untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari interpretasi atau penerapan DoP melalui pembicaraan atau negosiasi berdasarkan prinsip itikad baik. Jika para pihak yang terlibat tidak berhasil menyelesaikan perselisihan melalui pembicaraan atau negosiasi, mereka dapat meminta mediasi atau merujuk masalah tersebut kepada Kepala Negara atau Perdana Menteri mereka (Full text of “Declaration of Principles”, 2015).

Merujuk pada aturan tersebut, Mesir kemudian mengundang AS dan Bank Dunia untuk bergabung dalam negosiasi guna membantu ketiga negara mencapai kesepakatan tentang Bendungan GERD. AS dan Bank Dunia menerima undangan tersebut (Helal, 2020). Namun, pada pertemuan akhir, ketika kesepakatan dijadwalkan untuk ditandatangani kedua pihak, Etiopia menarik diri dari negosiasi (Attia & Saleh, 2021). Keputusan Etiopia untuk keluar dari pembicaraan sebelum menghasilkan kesepakatan mengindikasikan kegagalan negosiasi internasional sebagai upaya penyelesaian konflik Bendungan GERD.

2.7. Kesimpulan

Sungai Nil sebagai sungai terpanjang di dunia telah menjadi sumber kehidupan bagi banyak negara di Afrika, termasuk Mesir, Sudan, dan Etiopia. Ketiga negara tersebut telah bertahun-tahun menghadapi konflik imbas pembangunan Bendungan GERD yang diinisiasi Etiopia pada tahun 2011. Pembangunan bendungan ini ditujukan sebagai pembangkit listrik untuk keperluan domestik dan luar negeri. Namun, pembangunan ini ditentang negara yang berada di hilir yakni Mesir dan Sudan yang ketakutan bahwa pembangunan bendungan akan mengurangi pasokan air yang mengalir ke negaranya. Permasalahan utama terletak pada ketidaksepakatan terkait waktu pengisian waduk dan aliran air yang harus dialirkan ke negara-negara hilir. Ketiga negara kemudian berupaya menyelesaikan konflik melalui sejumlah pertemuan di antara mereka ataupun dengan melibatkan pihak lain. Upaya tersebut

belum menunjukkan titik terang karena berakhir dengan kegagalan tanpa menghasilkan suatu kesepakatan.